

Bab 2

PILIHAN IDEOLOGI LINGKUNGAN DALAM PRAKSIS MANAJEMEN SUBERDAYA HUTAN BERKESINAMBUNGAN

Oleh:

Samsul Bakri

2.1 PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan di Indonesia mulai memasuki babak baru yang mantap setelah DPR meratifikasi UNFCCC (sebagai salah satu buah dari KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992) menjadi undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1994, walaupun sebelumnya kita telah mengundang UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dari tonggak itu kemudian *Sustainable Forest Management* (SFM) telah menjadi *mainstream* pengelolaan SDH di Indonesia. Hutan dalam teori ekonomi dipandang sebagai sumberdaya, sesuatu yang dapat membangkitkan kesejahteraan baik secara fisik (mulai kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan) sampai kebutuhan puncak berupa kebergunaan bagi fihak lain atau *selfactualization* seperti yang dideskripsikan oleh Abraham Maslow (Garrow, 1992). Dalam memanfaatkan SDH untuk membangkitkan kesejahteraan, kata keberlanjutan *sustainable* merupakan kata kunci. Tetapi kata ini mempunyai dimensi waktu: hanya akan dapat diketahui pada masa mendatang akan kebenarannya. Oleh karena itu keberlanjutan harus menjadi perilaku bagi semua agen perekonomian tak terkecuali bagi yang

menggantungkan hidup pada SDH ini. Bila ada satu mata rantai agen tersebut yang tidak berperilaku yang mengarah kepada keberlanjutan maka, eksternalitas negatif sebagai dampak buruk dalam pengelolaan SDH akan mengancam keberlanjutan tersebut.

Mengingat SDH hutan merupakan SDA yang merupakan anugerah yang sangat luas dan karena itu sumberdaya ini selama berabad-abad telah menjadi *public domain*, sehingga pihak pemerintah merupakan satu-satunya agen yang sangat dominan dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan SDA ini. Dalam konteks ini perilaku pemerintah (sebagai pemegang otoritas kebijakan publik) akan sangat mempengaruhi nasib keberlanjutan SDA ini, karena setiap keputusan (*policy*) yang bertalian dengan pengaturan pemanfaatan SDA ini akan mengikat perilaku setiap individu yang berada dalam wilayah kekuasaan publik tersebut.

Lebih lanjut bila dilacak ke arah hulu, maka keberlanjutan tersebut akan sampai pada pangkal penentu keberlanjutan itu yaitu keyakinan (*belief*) yang dimiliki oleh perumus dan penentu kebijakan tersebut. Dengan kata lain, karena keberlanjutan itu secara pasti hanya dapat diketahui nanti di masa yang akan datang, setidaknya setelah satu siklus pengelolaan SDA tersebut, maka ideologi yang dianut oleh para perumus dan penentu kebijakan itulah merupakan hulu segala aspek perencanaan agar para agen pengelola berperilaku yang menuju kepada terminal di masa mendatang yang dikenal sebagai keberlanjutan tersebut.

2.2 PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP IDEOLOGI LINGKUNGAN

Secara generik ideologi dapat difahami sebagai suatu keyakinan (*belief*) yang dapat 0 makna suatu *belief* dari suatu ideologi lebih lanjut perlu diulas tentang ideologi lingkungan disertai jenis-jenis atau bentuk-bentuk ideologi lingkungan yang telah berkembang secara universal.

2.3 KLASIFIKASI IDEOLOGI LINGKUNGAN DALAM PEMANFAATAN SDA

Pada dasarnya ada dua jenis kaum jika diklasifikasikan menurut ideologi lingkungan yang dipilihnya dalam memanfaatkan SDA yaitu Kaum

Technocentric dan *Kaum Ecocentric* (Kerry *et. al.*, 1994 dan Pearce dan Turner, 1990). Keduanya berkarakter dan berposisi yang berlawanan. Kaum yang pertama berpedoman bahwa SDA merupakan *instrumental value* bagi manusia dalam membangun peradaban. Sebaliknya kaum yang ke dua memandang SDA sebagai *intrinsic*. Pada perkembangan berikutnya kedua ekstrim kiri dan ekstrim kanan ini kemudian masing-masing menjadi dua. Berikut merupakan karakteristik dari keempat kelompok tersebut.

2.3.1 Kelompok *Technocentric Conurpoian*

Dalam pandangan kaum antroposentrisme, istilah lingkungan secara generik dimaknai sebagai entitas atau segala hal yang berada di luar diri seseorang. Pandangan ini jika diterapkan untuk pengelolaan sumberdaya alam seperti sumberdaya hutan, maka secara kuat menurunkan perilaku individu yang sangat tamak atau *greedy* (lihat Kerry ddk., 1994) yang lebih lanjut pada perilaku yang eksplotatif demi untuk memenuhi keinginannya bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain pandangan dalam mensikapi (atau menilai) sumberdaya alam hanyalah sebagai alat (*instrumental value*) untuk memuaskan keinginan tiap individu manusia yang tidak bisa dibatasi atau pun dikekang itu. Keyakinan dari kelompok ini dalam menentukan keputusan untuk memanfaatkan SDA akan senantiasa terjebak pada orientasi untuk mengejar pertumbuhan (*progress trap*) seperti digambarkan oleh Hayami dan Godo (2006).

Mereka juga meyakini bahwa pasar bebas yang anti proteksionisme merupakan pilihan lebih lanjut agar eksplotasi SDA dapat memberikan manfaat yang terbesar, bahkan sepenuhnya individu tidak boleh dikekang dalam memanfaatkan SDA dengan mendaya gunakan kapital yang mereka miliki sampai sekarang ini. Menunda pemanfaatan SDA alam, bagi kaum ini, berarti telah mengorbankan *opotunity cost* yang besar yang mungkin tidak dapat dikompensasi dengan menggunakan apapun di masa mendatang.

Adapun mengenai adanya eksternalitas negatif (seperti emisi gas, erosi, banjir, sedimentasi, punahnya spesies dll) bagi mereka secara optimis dapat menstitusinya dengan menggunakan *man made capital* yang dapat dihasilkan oleh kemajuan Ipteks yang mereka ciptakan karena kecukupan kapital yang berhasil dicapai oleh peningkatan pendapatan (*baca*: pertumbuhan ekonomi) dalam mendanai remediasi atau pun dalam mendanai riset-riset substitusi.

Pada sebagian kelompok yang paling ekstrim dari kaum ini berkeyakinan jika misalkan ada spesies yang punah, katakanlah harimau Sumatera, maka di masa yang akan datang dapat diciptakan mutan melalui pengembangan bioteknologi yang dalam ekosistem fungsinya dapat mensubstitusi spesies yang punah tersebut. Begitu pula misalnya dengan lenyapnya lapisan *top soil* akibat erosi tanah ketika areal di kawasan hutan lindung dibuka, maka secara optimis kaum ini akan mampu menciptakan berbagai substrat biokimia yang mampu mempercepat proses pelapukan batuan dalam proses pembentukan tanah dengan kecepatan yang minimal seimbang dengan laju erosi tanah.

Kemampuan menciptakan Ipteks untuk substitusi elemen-elemen SDA yang rusak atau pun yang punah ini secara sangat optimis dapat dicapai karena tersedianya dana untuk riset yang merupakan rente ekonomi dari eksploitasi SDA yang sangat sangat massif tersebut. Kelompok ekstrim kiri ini, dalam tinjau ideologi lingkungan dikenal sebagai kaum atau kelompok *Technocentric_Conourcopian*.

Posisi dan sikap (*Green Label*) dalam memanfaatkan SDA seperti diuraikan tersebut juga berimplikasi pada kebutuhan ruang gerak aktivitas Tipe Perokonomian yang Anti perekonomian Hijau. Sering juga disebut *Red Economists* yang sangat optimis terhadap hasil-hasil ristek untuk memsubtitusi komponen ekosistem yang rusak ataupun yang punah tersebut. Dengan keyakinan (*belief*) ini, karakter kelompok ini secara ringkas berkarakter selain dicirikan oleh *Green Lable* dan Tipe Perekonomian (yaitu Strategi Manajemen, Pilihan Etika, dan Label Keberlanjutan dalam sistem sosial kemasyarakatan) dari kaum *T_Conurcopian* ini disajikan pada kolom paling kiri Tabel 1. Label keberlanjutan dari kelompok ini dengan demikian lemah.

2.3.2 Kelompok *Technocentric_Accomdating*

Derajat agak berkurang tensi terhadap eksploitasi SDA adalah pada kelompok *T_Accomdating*. Kelompok ini tidak pro pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga cukup mengontrol akan terjadinya kerusakan SDA maupun kepunahan habitat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dikendalikan dengan membebaskan pajak atas degradasi lingkungan untuk rehabilitasi kerusakan lingkungan menggunakan Ipteks yang ada. Kelompok ini juga

dikategorikan sebagai kelompok masyarakat perekonomian hijau (*green economic*).

2.3.3 Kelompok *Ecocentric_Communist*

Pada derajat yang lebih ketat berikutnya adalah Kelompok *Ecocentric_Communist*. Dikenal sebagai kelompok *deep green economic*, menerapkan *Gaia Theorm* secara moderat, menekankan pentingnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan penduduk pada level yang tetap pada posisi *zero growth*, memandang SDA merupakan *intrinsic value*. Label keberlanjutan ideologi ini tergolong kuat (*Strong*).

2.3.4 Kelompok *Ecocentric_Deep Ecologists*

Ideologi yang berlawanan atau ekstrim kanan adalah pada Kaum *Ecocentric* kelompok *Deep Ecologists* [*E_Deep Ecologists*]. Seperti dapat dirujuk pada Tabel 1, ideologi kelompok ini memiliki justifikasi label keberlanjutan yang sangat kuat (*Very Strong*) dengan karakteristik: *very deeply green economy, negatively economics growth, negatively polulation growth, Gaia Theorm holder, intrinsic value bioethics*. Kelompok ini yang memperjuangkan *animal right* maupun *plant right* di berbagai negara Eropa Barat.

Tabel 2.1 Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di berbagai Belahan Dunia

Ideologi Kaum [Kelompok]	Technocentric		Ecocentric	
	[T_Conurcopian]	[T_Accomodating]	[E_Communist]	[E_Deep Ecologist]
Posisi dan Sikap dalam Pemanfaatan SDA (<i>Green Lable</i>)	Posisi kaum ini selalu pada orientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, berperilaku eksploitatif terhadap SDA	Posisi kaum ini pada pengkonversasi SDAL, berperilaku sebagai pengelola SDAL (memilah antara kelompok SDAL untuk pertumbuhan terhadap yang harus dilindungi)	Posisi kaum ini pada proteksi atau perlindungan penggunaan SDAL, sikap dan perilakunya sebagai preservationis yang mencegah pertumbuhan ekonomi	Posisi kaum ini ekstrim pada pencegahan pemanfaat SDA, sikap dan perilakunya menurunkan pertumbuhan ekonomi (<i>Extreme preservationist positioni</i>).

Tabel 2.1 Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di berbagai Belahan Dunia (Lanjutan)

Ideologi Kaum [Kelompok]	Technocentric		Ecocentric	
Karakteristik	[T_Conurcopian]	[T_Accomodating]	[E_Communist]	[E_Deep Ecologist]
Tipe Perekonomian	Anti perekonoi hijau, dan pasar bebas	Perekonomi hijau, pasar hijau (<i>green market</i>) yang dipandu menggunakan sistem insentif sebagai instrumen (misalnya melalui pembebanan biaya polusi)	Perekonomian yang sangat hijau (<i>deep green economy</i>), kondisi perekonomian yang mapan dikendalikan menggunakan beberapa makroekonomi	Perekonomian yang sangat hijau sekali (<i>very deep economy</i>), diatur sangat ketat untuk meminimalkan pemanfaat SDA.
Strategi Pengelolaan	Tujuan dari berbagai kebijakan adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi (GNP). Menerapkan aksioma pasar yang sepenuhnya bebas dibarengi dengan kemajuan teknologi akan mampu melangsungkan substuti maupun memitigasi semua kendala kelangkaan SDA (<i>Minimum environmental source & sinks</i>)	Menerapkan modifikasi pertumbuhan ekonmi (via modifikasi neraca perekonomian) dalam merancang GNP-nya Penting untuk menurunkan kebergantungan (<i>decoupling</i>) terhadap SDA melalui sustitusi tetapi walau harus secara terbatas. Aturan keberlanjutannya adalah dengan melalui mempertahankan capital agar tetap kosntan sehingga skala ekonominya berubah.	Zero economy growth and Zero population growth <i>Decoupling</i> disertai dengan upaya mereduksi skala ekonomi. Prespektifnya secara sistem adalah bahwa kesehatan ekosistem secara utuh (keseluruhan) sangat penting sifatnya; perlu mengadopsi <i>Gaia Theorm</i> beserta implikasinya.	Keharusan untuk mereduksi skala perekonomian; secara kuat menerapkan <i>Gaia Theorm</i> bahwa setiap ada satu spesies yang punah hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh kehidupan di bumi.
Pilihan Etika	Pengusung alasan bebas etik klasik yaitu hak dan interes bagi individu sekarang (sentris pada manusia) harus dihargai; SDA itu merupakan instrumen untuk	Perkembangan dari pilihan etik kaum <i>T_conurcopian</i> yaitu pemelihara SDA untuk kebutuhan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang tetapi tetap SDA sebagai instrumen	Lebih berkembang dari pilihan etik kaum <i>T_Accomodating</i> yaitu kepentingan kolektif perlu didahulukan terhadap kepentingan individu, SDA	Penganut bioetik, SDA bernilai instrinsik, SDA (bahkan unsur abiotic) bukan diperuntukkan bukan bagi spesien manusia.

Tabel 2.1 Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di berbagai Belahan Dunia (Lanjutan)

Ideologi Kaum [Kelompok]	Technocentric		Ecocentric	
Karakteristik	[T_Conurcopian]	[T_Accomodating]	[E_Communist]	[E_Deep Ecologist]
	mencapai keinginan tiap individu manusia	untuk mencapai tujuan manusia	selain menilai sebagai instrumen bagi kepentingan umat manusia dan juga menilai instrinsik bagi SDA itu sendiri, (valuable in own right regardless of human experience).	
<i>Table of Sustainability</i>	<i>Very Weak</i>	<i>Weak</i>	<i>Strong</i>	<i>Very Strong</i>

Sumber: Kerry *et. al.* (1994); Pearce dan Turner (1990)

2.4 IDEOLOGI LINGKUNGAN SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SMF

2.4.1 Urgensi Memilih Ideologi Lingkungan

Manajemen bukanlah merupakan *science* dan bukan pula suatu penerapan teknologi, melainkan seni (*the art*) dalam menerapkan kedua sumberdaya itu (Iptek) untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu komunitas tertentu pula. Stimson dan Stough (2008) menyebut manajemen sebagai suatu praksis (*praxis*) atau praktek yang dibimbing teori. Karakter dari seni, sangat berbeda dengan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam suatu manajemen, praktek seni lebih banyak bersifat intuitif, yang sebenarnya jauh lebih sulit dan lebih kompleks dari pada penerapan Iptek. Karena bersifat seni, maka *out put* dari setiap manajemen jarang mempunyai persisi yang tinggi. Tetapi beruntung, ketajaman intuisi dari seseorang dapat ditempa, diasah, dan diasuh (*nurturing*, lihat Gerrow, 1992) melalui praktek, pelatihan, pemaangan, simulasi, dan pengkayaan pengalaman melalui *emersion process* dalam menghadapi kasus-kasus aktual di bidang masing-masing. Berkaitan dengan itu, kemampuan manajerial dari seseorang, dengan demikian, sebenarnya merupakan proses pengembangan *expert system* yang kontinyu

sifatnya. Dalam pandangan Stimson dan Stough (2008) proses akumulasi *knowledge capital*.

Di lain pihak, dalam setiap ilmu pengetahuan (*science*), perilaku suatu fenomenon (baik dalam fenomenon alam maupun sosial) telah dapat diteorikan (atau dideskripsikan atau pun dirumuskan) dengan persisi yang sangat tinggi, sehingga segala bentuk eksternalitas (baik yang bersifat menguntungkan atau pun yang merugikan) dapat diprediksi dan diidentifikasi dengan persisi yang tinggi pula. Dengan karakter Iptek yang seperti itu maka lebih lanjut penguatan (*amplifying*) terhadap dampak positif maupun proses mitigasi (*lessening*) terhadap dampak negatif dari suatu output manajerial dapat diupayakan dengan keyakinan yang tinggi pula. Karena itu pula, metode atau teknologinya yang efisien dan ekonomis yang diturunkan dari satu atau beberapa teori dapat dikembangkan dan diwujudkan serta dapat dimanfaatkan dengan relatif mudah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam *praxis* SFM.

Dalam konteks ini, dengan demikian, SFM dapat dimaknai sebagai praksis pemanfaatan Ipteks untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dari SDH secara berkesinambungan, baik untuk kepentingan individu maupun untuk masyarakat secara kolektif di suatu teritori dimana SDH tersebut berada. Dalam SFM kata keberlanjutan dari manfaat yang harus diperoleh maupun keberlanjutan dari hasil mitigasi maupun remediasi dan rehabilitasi terhadap dampak negatif menjadi tema sentral yang sangat urgen sifatnya untuk difahami dan diinternalisasikan kepada *mindset* para *policy maker*. Artinya akan menjadi suatu beban khusus (bagi setiap *policy maker*) karena pilihan terhadap suatu ideologi tersebut yang akan menjadi dasar bagi tahap operasionalisasi dalam setiap *praxis* SFM yang akan menjadi pedoman bagi para birokrat, sampai pada manajer SDH di tingkat tapak.

Selain itu, karena karakteristik kepemilikan atau penguasaannya dari setiap SDH tidaklah sepenuhnya dapat dibagi-bagi secara sempurna kepada individu-individu, maka manfaat (*good*) maupun mudarat (*bad*) yang dikandung didalamnya juga bersifat kolektif. Karena itu pula dalam terminologi tata pemerintahan di Indonesia hutan negara [HN] dikelompokkan sebagai barang publik (*public good*) yang hak penguasaannya berada pada pemegang otoritas kebijakan publik (*baca*: pemerintah) yang harus bebas terhadap interest individu-individu ketika mendistribusikan

manfaat dari barang publik (*public good*) seperti SDH tersebut. Begitu pula ketika menanggapi dampak negatif (*mudarat* alias *bad*) akibat eksploitasi SDH (seperti banjir, erosi, kekeringan, perubahan iklim, kerusakan habitat, konflik manusia *vs* satwa liar dsb) pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik haruslah berperilaku adil, tidak terlibat interes terhadap penghindaran akan tanggung jawab terhadap penanganan berbagai bentuk *public bad* tersebut.

Urgensi tersebut akan bertitik pangkal pada pilihan ideologi lingkungan yang harus dianut. Proses pemilihan ini akan menjadi beban mengingat kebersinambungan itu menyangkut ketidakpastian akan hasil yang mungkin dapat dicapai (yang sekaligus juga berarti dengan munculnya kemungkinan tidak dapat dicapai) di masa yang akan datang. Sementara berbagai teori *forecasting* tentang keadaan dimasa yang akan datang telah banyak dihasilkan oleh kaum ilmuwan dan juga teknologi *forecasting* pun sudah banyak tersedia sehingga prediksi akan keberhasilan bagi setiap program dalam praksis SFM dapat diramalkan melalui perencanaan untuk mencapai persisi hasil yang sangat tinggi. Namun begitu kehandalan dari perencanaan ini hanyalah akan dapat dibuktikan dalam masa yang akan datang persisinya, apalagi dalam konteks SFM memerlukan waktu yang relatif panjang terutama yang berbasis pada pengelolaan hutan alam konvensional penghasil kayu atau non kayu maupun yang berfokus pada rehabilitasi ekosistem yang melibatkan pemulihan viabilitas berbagai komunitas satwa liar (*wild life*).

Mengingat ideologi lingkungan merupakan suatu *belief* yang merupakan suatu kristal pemikiran dari berbagai praktek pengelolaan sumberdaya yang telah dipraktekkan di berbagai bangsa di berbagai belahan dunia, maka pilihan ideologi harus menjadi dasar pijakan setiap perencanaan yang harus diputuskan di level *policy maker* lebih awal sebelum melakukan perencanaan SFM bagi setiap jenis fusi hutan. Langkah ini mempunyai kedudukan strategis berkaitan dengan distribusi keadilan baik antarindividu maupun antarspasial, baik di dalam generasi yang sama maupun antargenerasi, baik dalam mengakses manfaat maupun menanggungjawab terhadap *mudarat* (*public bad*) yang terjadi.

Eksplorasi maupun pengelolaan SDH dapat menyebabkan dampak pada kelangkaan bahkan pada kepunahan spesies tertentu. Bila seorang *planner* menjadi abdi seorang *policy maker* yang memilih ideologi *T*—

conucopian yang mengutaakan mengejar target pertumbuhan ekonomi (*baca*: penumpukan *capital*). Pilihan itu dapat menyediakan akses terhadap manfaat bagi individu atau bagi masyarakat sekarang, sedangkan kelangkaan spesies akibat praktek pengelolaan yang sangat eksploitatif tersebut tentu bebannya akan dipikul oleh generasi yang akan datang. Ketidakadilan antargenerasi seperti ini dapat terjadi terutama bila program penggunaan substitusi Iptek tentang pengembangan mutan misalnya kurang berhasil atau malah gagal seperti timbulnya mutan-mutan baru yang membahayakan seluruh kehidupan di muka bumi ini.

Demikian pula halnya atas pilihan ideologi lingkungan seperti itu dapat berimplikasi pada praktek pengelolaan SDH misalnya pengembangan hutan tanaman pada areal-areal dengan elevasi yang relatif tinggi dan dengan kemiringan lahan yang relatif besar di bagian hulu dari suatu DAS. Manfaatnya jelas akan dapat dinikmati oleh pemegang hak kelola dan juga oleh *public authority* melalui provisi maupun benefit lainnya dan mungkin masyarakat di wilayah hulu. Namun masyarakat di hilir dapat saja harus menanggung beban berupa banjir di musim hujan. Ketidakadilan antarspasial ini bisa mungkin terjadi terutama ketika program substitusi Iptek berupa introduksi teknologi konservasi tanah dan air gagal diterapkan berhubung mungkin ketrampilan masyarakat yang masih rendah misalnya. Ringkasnya pilihan ideologi lingkungan bagi *policy maker* sangat urgen untuk dikaji sebelum benar-benar diterapkan bagi pengembangan *praxis* SFM.

2.4.2 Pilihan Ideologi bagi Kelompok Fungsi Kawasan Hutan di Indonesia

1. Hutan Rakyat

Di luar fungsi hutan miilik atau hutan rakayat [HR], sebagaimana yang dianut di banyak negara di berbagai belahan dunia lainnya, berdasarkan fungsinya kawasan hutan negara [HN] di Indonesia umumnya dikelompokkan ke dalam Hutan Konservasi [HK], Hutan Lindung [HL], dan Hutan Produksi [HP]. Mengingat *Green Lable*-nya yang antiperekonomiam hijau, implikasi pada perilakunya yang *progress trap* (*growth oriented*), penjujung pasar bebas yang radikal, dan pilihan etikanya pada *instrumental value* terhadap setiap SDH, maka pilihan ideologi *Technocentric_Conurcopian* secara kasar (*rule of*

thumb) nampaknya belum bahkan tidak prospektif untuk dijadikan landasan bagi *praxis* SMF untuk ketiga jenis fungsi hutan ini di Indonesia.

Ideologi *Technocentric_Conurcopian*, yang ekstrim kiri ini nampaknya yang paling prospektif jika diterapkan pada hutan milik ataupun hutan rakyat [HR] yang dapat ditebang habis kayunya untuk dialihfungsikan menjadi penggunaan lain yang mempunyai rente lahan (*land rent*) yang lebih besar seperti untuk tanaman perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, untuk pemukiman, bahkan untuk kegiatan industri atau jasa-jasa yang rente lahannya sangat besar yang dapat mencapai pertumbuhan pendapatan (*baca*: pertumbuhan ekonomi) klimaks paling besar. Namun ketika sebelum ditebang ternyata teridentifikasi sebagai habitat satwa liar yang dilindungi peraturan perundang-undangan seperti burung rangkong (*Buceros bicornis*), ular sanca (*Malayopython reticulatus*), trenggiling (*Paramanis javanica*) atau pun lainnya, maka Si Pemilik HR ini tidak berhak untuk mengambil manfaat ekonominya, malainkan wajib untuk melaporkan kepada BKSDA (sebagai otoritas publik) yang bertanggung jawab terhadap konservasi satwa liar di luar kawasan HN.

Artinya sekalipun hak-hak pribadi dalam kepemilikan HR begitu kuat, tetapi di dalamnya masih mungkin terkandung hak-hak publik di sini. Alasannya antara lain bahwa individu atau entitas lain seperti kaum *Ecocentric* memiliki hak atas kelestarian ketiga spesies satwa liar tersebut, karena kelompok *Ecocentric* ini berkeyanian bahwa jika ada satu saja spesies yang punah maka merupakan ancaman kepunahan ekosistem di muka bumi (*Gaia Theorm*) dalam merancang strategi pemanfaatan SDA. Begitu pula sekalipun tidak ditemukan satu atau beberapa spesies satwa liar, dalam konversi HR maka hak-hak publik harus tetap dijamin utamanya yang bakal menimbulkan mudarat bagi pihak lain *public bad* seperti erosi, banjir, kelongsoran, bahkan cemaran udara seperti asap atau aroma tidak sedap.

2. Kawasan Hutan Konservasi

Terminologi konservasi di Indonesia agak berbeda dengan konservasi yang digunakan dalam klasifikasi ideologi lingkungan. Konservasi di Indonesia masih punya konotasi pada asas pemanfaatan bukan pelarangan. Sedangkan dalam ideologi lingkungan punya konotasi pelarangan. Walaupun begitu sebenarnya kelompok kawasan Hutan Konservasi [HK] ini memang

mempunyai kawasan yang dilarang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sebagai menghela pertumbuhan ekonomi yaitu Cagar Alam (CA) dan Suaka Alam (SM). Sedangkan Taman Nasional [TN], Taman Hutan Raya [Taharu] dan Taman Buru [TB] masih memberikan ruang pada upaya untuk menghela pertumbuhan ekonomi, sekalipun ini hanya terbatas pada zona pemanfaatan yang luasannya maksimal 5% saja.

Pada kawasan CA dan SA tentu saja patut seorang *policy maker* mempunyai *forest planner* yang berhaluan ideologi lingkungan *E-Deep Ecologist* dalam merancang SFM. Kepada kedua jenis elit inilah *Gaia syndrome failure* dapat diharapkan untuk dihindari. Implikasinya bahwa dalam merancang *praxis* SFM pada kedua kawasan ini, maka *policy maker* haruslah mengedalikan *planner*-nya untuk membuat target berupa: (a) reduksi luasan pada bagian kawasan yang telah dirambah atau telah dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi seperti rekreasi ataupun lainnya, dan (b) memulihkan kerusakan habitat pada SA. Minimal dengan kedua *praxis* seperti itu, maka pencegahan kerusakan ekosistem lebih lanjut maupun upaya pemulihannya dapat diharapkan relative cepat berhasil.

Pada kawasan TN, Tahura dan TB setidaknya *policy maker* maupun *forest planner* mengambil sikap pada posisi *E_Communist*, suatu sikap yang tidak seketat sikap kaum *E-Deep Ecologist*. Sikap ini dimungkinkan mengingat ketiga jenis fungsi kawasan ini punya alokasi untuk zona pemanfaatan untuk menghela pendapatan publik. Namun pemanfaatan tersebut haruslah tidak menjadi target kontributor bagi target pertumbuhan ekonomi nasional ataupun ekonomi lokal. Arinya *praxis* untuk SFM yang harus dirancang: (a) pertumbuhan ekonomi sebagai hasil atau sebagai *rente* yang diperoleh melalui pendayagunaan zona pemanfaatan haruslah dipertahankan nol dari tahun ke tahun, dan (b) melakukan rehabilitasi habitat yang rusak ataupun yang telah dirambah.

3. Pada Hutan Lindung

Demikian pada kawasan hutan lindung [HL] baik *policy maker* atau pun *forest planner* seyogyanya juga bersikap pada posisi *E_Communist*. Argumentasi yang dapat diajukan di sini bahwa sebenarnya kawasan HL juga berfungsi sebagai pelidung habitat yang berada di areal-areal dengan elevasi yang relative rendah, tidak terkecuali habitat manusia termasuk segala fasilitas

budayanya seperti bendungan, waduk, saluran irigasi ataupun badan-badan perairan lainnya. Dengan demikian *praxis* yang harus dirancang SFM bagi kawasan HL juga sama dengan kawasan TN, Tahura dan TB.

4. Pada Hutan Produksi

Persolannya kemudian yang paling pelik adalah justru pada kawasan HP. Kawasan ini memang di satu sisi harus memikul beban untuk berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Apalagi kawasan hutan di Indonesia yang selama ini memiliki luasan kawasan hampir 70% sejak lama jaman Kolonial tetapi kontribusi pada PDB/ha (Bakri, 2012) sangat jauh dari penggunaan di APL atau di luar kawasan hutan.

Namun sementara dengan kondisi Iptek yang belum dapat diyakini mampu untuk dapat melakukan substitusi secara penuh terhadap kerusakan atau kepunahan spesies, maka ideologi *T_Conurcopian* yang sangat bersifat *Red Economisc* (Tabel 2.1) bagi para *policy maker* atau pun para *forest planner* bukan merupakan pilihan dalam merancang SFM pada HP umumnya.

Pilihan yang paling *vafourable* sebenarnya adalah pada ideology *E_Comunalists* mengingat dalam HP pun masih mengemban fungsi ekologis yang merupakan domain public. Namun pilihan ini menjadi tidak realistis ketika mensyaratkan *zero economic growth & zero population growth*. HP memang tidak selayaknya dirancang untuk *zero ecomoncs growth* mengingat fungsi fungsi utamanya kawasan ini adalah untuk kegiatan produktif, menyerap pengangguran apalagi kepemilikan lahan rata-rata masyarakat tergolong sangat sempit, jika tidak maka perambahan akan sulit untuk dikendalikan dan kerusakan HP akan semakin parah khususnya untuk Pulau Kalimantan dan Sumatera, dua pulau terbesar dari sisi laju deforestasi tahunannya di Indonesia (lihat IFW, 2012).

Keadaan itu diperberat ketika persyaratan *zero population growth* yang hampir tidak mungkin dipenuhi oleh Indonesia yang sedang mengalami transformasi struktural perekonomian nasional dari corak eksploitasi SDA ke industri pengolahan (Affandi, 2009). Sebagaimana yang dialami oleh hampir semua negara maju ketika dalam periode transisi sepertri itu ini pendapatan masyarakat meningkat menyebabkan fertilitas meningkat dan akhir *zero population growth* sifatnya *impossible* untuk diraih (lihat Hayami dan Godo, 2005).

Karena itu pilihan ideologi yang paling realistis untuk merancang *praxis* SFM bagi kawasan HP di Indonesia umumnya adalah pada ideology *T_Accomodating*. Memang label keberlanjutan bagi pengembangan HP masih tergolong lemah jika menganut pilihan ideology ini, tetapi sebagian rente ekonomi yang dihasilkan dari *praxis* SFM perlu untuk lebih banyak digunakan untuk membiaya substitusi teknologi, remediasi, serta rehabilitasi agar dapat menekan kerusakan lingkungan ataupun untuk pencegahan spesies yang hampir punah.

Dengan cara seperti itu maka dapat diharapkan SFM pada HP secara langsung dapat menyerap banyak pengangguran, membangkitkan berbagai kegiatan perekonomian (transportasi, idustri hilir, wisata, dan jasa-jasa). Selanjutnya secara tidak langsung, kembali dapat menyerap pengangguran secara masal yang pada gilirannya dapat menurunkan perambahan hutan, yang berarti dapat meningkatkan keberlanjutan fungsi produksi pada kawasan HP.

Adapun langkah menyusun *praxis* SFM pada HP ini secara ringkas meliputi: (a) penghitungan pertumbuhan PDB yang dikontribusikan oleh HP per ha per tahun; (b) menghitung efek penggada (*multiplier effect*) kepada pertumbuhan PDB sektor-sektor lain melalui analisis I/O setiap wilayah; (c) merancang *business plan* berbagai komodias kehutanan yang bermuarakan pada pertumbuhan ekonomi per wilayah dimana HP terletak.

2.5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan yang dapat dibuat dari Bab 2 ini adalah bahwa pilihan Ideologi lingkungan yang adil untuk diadopsi oleh para *policy maker* maupun *forest planner* di Indonesia dalam merancang SFM dapat diwujudkan bagi masing-masing kawasan hutan [dengan *pilihan ideologinya*] adalah: (a) bagi kawasan CA dan SM [*Ecocentric_Deep Ecologist*]; (b) TN, Tahura, TB dn HL [*Ecocentric_Communalists*]; dan (d) HP [*Technocentric_Accomodating*].

Adapun saran yang dipandang penting untuk direkomendasikan dari topik ini adalah bahwa di wilayah-wilayah yang memiliki kawasan hutan perlu melakukan analisis I/O antara pertumbuhan ekonomi di sektor kehutanan terhadap sektor-sektor lain: perkebunan, sektor pertanian pangan, sektor perdagangan, transfortasi, wisata, industri, listrik, gas, air bersih, dan

keuangan. Dengan begitu dapat terukur *multiplier effect* yang dibangkitkan oleh sector kehutanan kepada sector-sektor lainnya. Nilai ini dapat menjadi *feed back* (cocok-balik atau langkah retrospektif) dalam merancang *praxis* SFM sekaligus untuk meng_ *adjust* pilihan ideologi dalam pembangunan kehutanan di Indonesia ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. I. 2009. Peran agroindustri dalam perekonomian wilayah Provinsi Lampung: Analisis keterkaitan antarsektor dan aglomerasi industri. *Disertasi*, SPs IPB, Bogor.
- Bakri, S. 2012. Fungsi intrinsik hutan dan faktor endogenik pertumbuhan ekonomi sebagai determinan pembangunan wilayah Provinsi Lampung. *Disertasi*. SPS. IPB Bogor.
- FWI (Forest Watch Indonesia). 2012. Potret Keadaann Hutan Indonesia.
- Gerrow, G. 1992. *Psicology: An Introduction*. Johs Wiley & Sons. New York.
- Hayami, Y., dan Y. Godo. 2005. *Development Economics. From the Poverty to the Wealth of Nation*. 3rd. Ed. Oxford University Press.
- Kerry, T., D. Pearce, dan E. Rubienfeld. 1994. *Economics of Natural Resouce*. Simon & Shuster. Int. Group.
- Pearce, D. W. and R. K. Turner. 1990. *Economics of Natural Resources and The Environment*. Harvester Wheatsheaf. New York.
- Randall, A. 1987. *Resource Economics: An Economics Approach to Natural Resource and Environmental Policy*. John Wiley and Sons, NewYork.
- Stimson, R. J. dan R. R. Stough. 2008. Changing approach to economics development: Focus on Endogenous Factors. *Working Paper*, Financial Development and Regional Economics, Regional Science Association International and Banco Central de la Republica Argentino.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

SURAT KETERANGAN JENIS BUKU

Nomor : 2143/UN26.21/PN/2023
Lampiran : 1 (Satu) Buku

Berdasarkan hasil review atas karya:

Nama : Christine Wulandari, Indra Gumay Febryano, Rahmat Safe'i, Samsul Bakri, Slamet Budi Yuwono

ISBN : 978-602-6912-37-4

Penerbit : Plantaxia

Tahun Terbit : 2016

Unit Kerja : Fakultas Pertanian

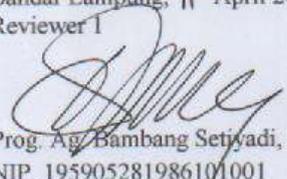
Dengan ini kami sampaikan hasil review dalam tabel berikut:

No	Judul	Keterangan				
		Referensi	Monograf	Buku Penelitian lain: termasuk Book Chapter	Buku Ajar	Buku Lain
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan : Provokasi Pemikiran Arsitektur, Konsep, dan Strategi			a. Buku Hasil Penelitian b. Book Chapter		

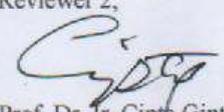
Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 April 2023

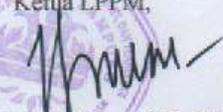
Reviewer 1

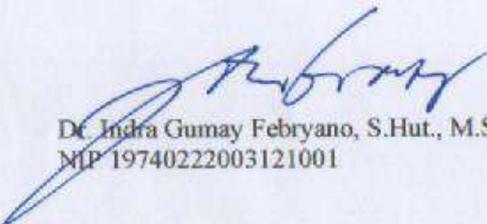
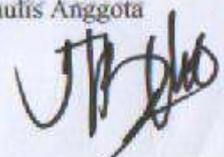

Prog. Ag. Bambang Setiyadi, Ph.D.
NIP. 195905281986101001

Reviewer 2,


Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc.
NIP. 196012011984031003

Menyetujui,
Ketua LPPM,


Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
NIP. 197112119951210001

UNIVERSITAS LAMPUNG	
NO. INVEN	12-4-2023
JENIS	30/B/B/IN/FP/2023
Bookchapter	
LEMBAR PENGESAHAN	
Judul Buku	: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Provokasi Pemikiran Arsitektur, Konsep, dan Strategi
Penulis	: Christine Wulandari, Indra Gumay Febryano, Rahmat Safe'i, Samsul Bakri , Slamet Budi Yuwono
Jurusan	: Kehutanan
Fakultas	: Pertanian
ISBN	: 978-602-6912-37-4
Jumlah Halaman	: 127
Cetakan ke	: Satu (Pertama)
Penerbit/Tempat Tahun	: Plantaxia/Jogjakarta : 2016
Mengetahui:	
Ketua Jurusan Kehutanan	Bandar Lampung, 29 Maret 2023 Penulis Anggota
	
Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si. NIP 19740222003121001	Dr. Ir. Samsul Bakri, 2022 NIP 196105051987032001
Menyetujui:	
Wakil Dekan	Ketua LPPM Unila
	
Prof. Dr. Ir. Barnomo, M.S. NIP 196406131987031002	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si. NIP 197111211995121001

 plantaxia

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI



**Christine Wulandari - Hari Kaskoyo - Indra Gumay Febryano
Rahmat Safe'i - Samsul Bakri - Slamet Budi Yuwono**

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

PROVOKASI ARSITEKTUR, PEMIKIRAN, KONSEP DAN STRATEGI

**Christine Wulandari - Hari Kaskoyo - Indra Gumay Febryano
Rahmat Safe'i - Samsul Bakri - Slamet Budi Yuwono**

 **plantaxia**

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Provokasi Arsitektur Pemikiran, Konsep dan Strategi

oleh Christine Wulandari; Hari Kaskoyo; Indra Gumay Febryano; Rahmat Safe'i; Samsul Bakri; Slamet Budi Yuwono

Editors: Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuw, M.Si; Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc; Ir. Warsono, Ph.D

Hak Cipta © 2016 pada penulis



Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

E-mail: info@plantaxia.com; Web: www.plantaxia.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Judul

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Provokasi Arsitektur Pemikiran, Konsep dan Strategi/Wulandari, Christine

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Plantaxia, 2016
xvi + 118 hlm.; 25 cm

Bibliografi.: 11; 27; 49-53; 66-67; 77-80; 92-93; 112-117

ISBN : 978-602-6912-37-4

E-ISBN : 978-602-6912-38-1

1. Ekologi - Ekologi Hutan

I. Kaskoyo, Hari

II. Febryano, Indra Gumay

III. Safe'i, Rahmat

IV. Bakri, Samsul

V. Yuwono, Slamet Budi

VI. Judul

577.3

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Pembangunan sektor kehutanan di Indonesia telah memasuki babak baru sejak berlangsungnya reformasi dan desentralisasi tata pemerintahan, terutama sejak diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti menjadi Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekalipun sudah berlangsung hampir dua dasawarsa, namun episode perubahan tatanan kelembagaan nasional tersebut dirasa belum bisa sepenuhnya mengendalikan tata kelola pembangunan kehutanan yang berkesinambungan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan itu sendiri. Bahkan untuk beberapa wilayah telah menampakkan gejala kemerosotan kualitas lingkungan hidup termasuk kualitas maupun fungsi hutan. Kondisi ini nampak setidaknya ketika periode ulang musim ekstrim berlangsung. Salah satunya adalah ketika La Nina muncul maka terjadi kenaikan permukaan air sehingga akibatkan banjir, longsor, erosi, sedimentasi juga akibatkan adanya pendangkalan danau, waduk, maupun bendungan. Sebaliknya ketika El Ninno, dalam waktu singkat terjadi kekeringan, penyusutan badan-badan air, pasokan PLTA, kahat air bersih di kawasan urban, bahkan kebakaran hutan terjadi pada berbagai wilayah di tanah air tercinta.

Berbagai fenomena yang berdampak negatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan ekologi itu telah menggugah para peneliti dan para praktisi di

sektor kehutanan untuk memikirkan peneguhan kembali pengejawatahan konsep dan reorientasi strategi pembangunan sumberdaya hutan dalam bingkai otonomi daerah yang tetap selaras dengan kesepakatan di KTT Bumi yang pertama di Rio de Janeiro 1992. Berkaitan dengan maksud ini saya selaku akademisi atau pun selaku Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyambut gembira upaya sejawat akademisi kehutanan khususnya yang bernaung di Universitas Lampung (Unila), yaitu Dr. Christine Wulandari dkk. dalam menyumbangkan buah fikirannya berupa konsep-konsep pengelolaan hutan berkelanjutan yang ditinjau dari berbagai aspek dan telah tersusun dalam 7 bab buku ini. Lebih jauh saya berharap disusul oleh sejawat lainnya baik dari kalangan akademisi, praktisi ataupun dari stake holder kehutanan lainnya. Dengan maraknya buah fikiran semacam yang tertuang dalam buku ini maka upaya-upaya berbagai pihak yang merupakan stakeholder sektor kehutanan akan menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan sekaligus menyejahterakan rakyat dan dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat. Akhir kata semoga buku ini banyak membawa manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Wassalamualaikum wr. wb.,

Jakarta 29 September 2016

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR FOTO	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PILIHAN IDEOLOGI LINGKUNGAN DALAM PRAKSIS MANAJEMEN SUBERDAYA HUTAN BERKESINAMBUNGAN	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Pemahaman terhadap Konsep Ideologi Lingkungan	14
2.3 Klasifikasi Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA	14
2.4 Ideologi Lingkungan sebagai Landasan Kebijakan Publik dalam SMF	19
2.5 Simpulan dan Rekomendasi	26
Daftar Pustaka	27
BAB 3 PENERAPAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK DALAM MENGANALISIS PENGELOLAAN HUTAN	29
3.1 Pendahuluan	29
3.2 Pengelolaan Hutan di Indonesia	31
3.3 Pengertian <i>Livelihood</i> dan <i>Sustainable Livelihood</i>	34

3.4	<i>Sustainable Livelihood Framework</i>	36
3.5	Aset-aset Penghidupan	37
3.6	Konteks kerentanan	40
3.7	Perubahan, struktur dan proses	40
3.8	Strategi-strategi/kegiatan-kegiatan <i>livelihood</i> dan hasil	41
3.9	<i>Sustainable livelihood framework</i> dalam pengelolaan hutan di Indonesia	42
3.10	Kesimpulan dan rekomendasi	48
	Daftar Pustaka	49
BAB 4	PERTIMBANGAN ASPEK HIDROLOGI, LAHAN DAN IKLIM DALAM PENGELOLAAN DAS (ZONASI AGRO EKOLOGI DALAM PENGGUNAAN LAHAN)	55
4.1	Pendahuluan	55
4.2	Kebijakan Pengelolaan DAS yang Berkaitan dengan Penggunaan Lahan	58
4.3	Pertimbangan Teknis Penggunaan Lahan yang Rasional dalam Pengelolaan DAS	62
4.4	Penutup	66
	Daftar Pustaka	66
BAB 5	KESEHATAN HUTAN: PENTINGNYA KESEHATAN EKOSISTEM HUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	69
5.1	Pendahuluan	69
5.2	Konsep Kesehatan Ekosistem Hutan	71
5.3	Penyebab Masih Kurang Seriusnya Perhatian Terhadap Kondisi Kesehatan Ekosistem Hutan	73
5.4	Pemantauan dan Penilaian Kesehatan Ekosistem Hutan	74
5.5	Simpulan Dan Rekomendasi	77
	Daftar Pustaka	77
BAB 6	EKOLOGI POLITIK PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM	81
6.1	Pendahuluan	81
6.2	Definisi Ekologi Politik	82

6.3	Dimensi Politisasi Lingkungan	85
6.4	Pendekatan dalam Ekologi Politik	86
6.5	Relasi Kekuasaan antar Aktor	89
6.6.	Penutup	92
	Daftar Pustaka	92
BAB 7	PENTINGNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI	95
7.1	Pendahuluan	95
7.2	Mengapa Perlu Ada Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	97
7.3	Beberapa Kebijakan Yang Relevan Dengan Peran Serta Masyarakat Di Kawasan Konservasi	101
7.5	Manfaat Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi	103
7.6	Contoh Di Lapangan Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Bandar Lampung	103
7.7	Kesimpulan Dan Rekomendasi	111
	Daftar Pustaka	112
	Daftar Peraturan Perundangan	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Sustainable Livelihood Framework (Kerangka kerja Penghidupan yang berkelanjutan) oleh DFID.	37
Gambar 3.2	Kerangka kerja Penghidupan yang berkelanjutan untuk menganalisis pengelolaan hutan lindung (modifikasi dari Kaskoyo, H, 2015).	43
Gambar 7.1	Peta situasi Tahura WAR terhadap daerah sekitar	107

DAFTAR FOTO

- Foto 3.1** Tanaman Kopi yang Dibudidayakan Secara Agroforestry di Zona Budidaya di Hutan Lindung Pada Program Hutan Kemasyarakatan 44
- Foto 3.2** Tanaman Campuran di Zona Budidaya Pada Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 45
- Foto 3.3** Satwa Liar, Siamang, yang Berada di Zona Perlindungan di Hutan Lindung Pada Program Hutan Kemasyarakatan. 46
- Foto 3.4** Sungai Kecil yang Sumber Mata Airnya Berasal Dari Zona Perlindungan, Digunakan Untuk Sumber Tenaga Mikrohidro. 46
- Foto 3.5** Zona Perlindungan yang Dibuka Oleh Masyarakat Untuk Budidaya Tanaman Pada Salah Satu Lokasi Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 47
- Foto 3.6** Getah Karet Dan Foto 3.7. Biji Kopi Sebagai Hasil Utama Pendapatan Masyarakat Pada Salah Satu Program Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung. 47
- Foto 7.1** Pelantikan Kelompok Sadar Wisata Gunung Betung Oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2015) 105
- Foto 7.2** Pembangunan 3 Buah Gazebo di Lokasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 106

- Foto 7.3** Pembangunan Pondok Pertemuan di Lokasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 108
- Foto 7.4** Pertemuan Pokdarwis dengan Tim Universitas Lampung dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung Beserta Jajarannya Membahas Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Gunung Betung (Foto Oleh Christine Wulandari, 2016) 109

-oo0oo-

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pilihan Ideologi Lingkungan dalam Pemanfaatan SDA yang telah Berkembang di Kalangan Kaum Teknokratik dan Para Penentu Kebijakan di Berbagai Belahan Dunia	17
Tabel 4.1	Alternatif Pemecahan Masalah dengan Pendekatan Ekosistem DAS.	64
Tabel 6.1	Tesis Ekologi Politik	84
Tabel 6.2	Dimensi Politisasi Lingkungan	85
Tabel 6.3	Konsep dan Proses dalam Ekologi Politik	88

